

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peristiwa kehidupan sosial politik bangsa dalam bingkai demokrasi konstitusional Indonesia sejak reformasi bergulir di negeri ini, belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas demokrasi konstitusional yang sebenarnya. Nilai, prinsip dan kaidah demokrasi belum dapat dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dengan benar dan penuh kesadaran. Baik secara formal atau pun tidak, disengaja atau pun tidak, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratisasi bangsa. Realitas ini, dalam bahasa Sumantri (1998:4) disebut “*undemocratic democracy*,” yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur (institusi) demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi. Kondisi yang dirasakan paradoksal antara realitas dengan nilai dan norma yang diajarkan atau dipidatokaan.

Selama ini, tampaknya atmosfer demokrasi belum diimbangi dengan kecerdasan, kematangan, dan kearifan bangsa, sehingga arah reformasi seringkali menimbulkan “euforia” demokrasi yang tanpa arah. Fakta-fakta sikap dan perilaku yang “*undemocratic*” dan “*unconstitutional*” yang teramati saat ini adalah masifnya berbagai aksi anarkhi dalam perhelatan pemilu-kada di berbagai daerah. Menerima kekalahan dengan sikap lapang dada bagi pihak yang kalah menjadi sebuah idiom yang amat mahal harganya dan sulit diwujudkan. Selain itu,

perilaku kaum elit politik cenderung masih konservatif dan berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik berbaju simbol-simbol kultural maupun keagamaan. *Mainstream* perilaku kalangan elit ini pun pada akhirnya mudah berimbis kepada perilaku politik massa, semisal, sering terjadinya tawuran antar suku atau kampung, antar pelajar, demonstrasi anarkhis, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mencermati hiruk-pikuk atmosfer demokratisasi kehidupan berbangsa yang “*undemocratic-inconstitucional*” di atas, maka agenda penting dan urgen dilakukan adalah membangun budaya demokrasi yang “*genuine*” (mengakar). Budaya demokrasi ini menunjuk pada berlakunya nilai-nilai, prinsip dan kaidah demokrasi di masyarakat yang terinternalisasikan dalam sikap dan perilaku hidup keseharian maupun kehidupan kenegaraan.

Membangun budaya demokratis ini tidak dapat dilakukan sekali jadi, tetapi memerlukan proses pembelajaran dan pengamalan (*learning by experiences*) berdemokrasi. Sebagaimana ditegaskan Gandal and Finn (1992:2) bahwa “*Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*”. Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Semakna dengan itu, Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2) mengemukakan “*democracy is not a machine that would go on itself, but must be consciously reproduced, one generation after another*”, bahwa demokrasi

bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu, secara substantif dalam dimensi jangka panjang, yakni untuk membangun karakter bangsa yang demokratis, pendidikan demokrasi (*education for democracy*) mutlak diperlukan. Seyogianya hal itu tidak dilaksanakan secara *"trial and error"* atau *"taken for granted"*, tetapi didesain secara sistemik dan sistematis untuk membina dan mengembangkan prinsip-prinsip, nilai dan budaya warga negara demokratis, partisipatif dan berkeadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Ada dua alasan menurut Azra (2001:3), mengapa pendidikan demokrasi merupakan kebutuhan mendesak dan penting dalam membangun budaya demokratis (*democratic culture*). *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan *"political illiteracy"*, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya apatisme politik (*political apathism*) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Atas argumentasi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya sistemik penyemaian konsep, prinsip, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi.

Analisis kritis Azra di atas, memperkuat hasil *"National Survey of Voter Education"* (Asia Foundation, 1998) yang menggambarkan data bahwa lebih 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang *"apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi."* Hal ini, menunjukkan bahwa kecerdasan yang

dibutuhkan untuk mematuhi tatanan dan budaya demokrasi belum pula dimiliki secara cukup oleh mayoritas bangsa. Padahal, menurut analisis Urbaningrum (2004:2), tanpa kecerdasan, disiplin, dan kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap pribadi-pribadi, penciptaan kehidupan demokratis hanyalah utopia semata.

Pendidikan demokrasi untuk membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik bangsa, di negara Indonesia telah dilaksanakan, khususnya sejak berakhirnya era orde baru dan lahirnya era reformasi. Namun, perlu direkonseptualisasi, sehingga lahir paradigma pendidikan demokrasi yang bukan hanya secara konstitusional ada, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial-kultural kumulatif bagi peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan ber-HAM di Indonesia.

Pendidikan demokrasi ini menurut Azra (2002:166) secara substantif menyangkut sosialisasi, internalisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis dan beradab. Hal senada dikatakan Zamroni (2002:21) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, social trust* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, juga bagi masyarakat.

Pandangan terakhir Zamroni di atas, menguatkan bahwa pendidikan demokrasi secara inheren merupakan substantif dan sub-ordinatif pendidikan kewarganegaraan dalam persekolahan (*school civics*). Dalam konteks ini, Winataputra (2005:12; 2008:9) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*school civics*) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pengembangan budaya kewarganegaraan demokratis, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan beradab. Untuk tujuan itu, maka kurikulum dan proses pembelajaran perlu diupayakan agar lebih mengarah pada tujuan pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam bentuk transformasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dapat mendukung berkembangnya budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Dalam konteks di atas, maka pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai *wahana sistemik pendidikan demokrasi* (Winataputra, 2001), yang secara praksis-kurikuler semestinya tidak hanya dalam kerangka “*learning to know*” (belajar memahami konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi), tetapi harus merupakan proses berperilaku demokratis (*learning to do*), serta sebagai proses hidup dan berkehidupan demokratis dalam masyarakat majemuk di Indonesia (*learning to be and learning to live together*), hari ini dan mendatang. Oleh karena itu, menurut Gandal dan Finn (1992:4), pendidikan kewarganegaraan juga tidak dilihat sebagai “*isolated subject*” (pelajaran yang terisolasi), yang diajarkan hanya

dalam waktu terjadwal saja, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, termasuk banyak hal yang terjadi di luar sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan demokratis di Indonesia, secara historis kurikuler telah mengalami pasang surut (Winataputra, 2005:5-6). Dalam kurikulum sekolah, dikenal mulai dari *Civics* tahun 1962 yang bernuansa indoktrinasi politik; *Civics* tahun 1968 sebagai unsur Pendidikan Kewargaan Negara yang bernuansa pendidikan IPS; PKN tahun 1969 yang berbentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 dengan isi pembahasan P4; PPKn tahun 1994-2003 sebagai penggabungan pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4; PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) tahun 2004 sampai sekarang yang bercirikan struktur keilmuan yang berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral/Pancasila.

Kini, pendidikan kewarganegaraan direkonseptualisasi dalam paradigma baru (*new civic education paradigm*). Dalam konteks paradigma baru ini, Sapriya dan Winataputra (2004:2) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok; yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*); bercirikan multidimensional (Cogan, 1998:117; Winataputra, 2001; Sapriya, 2004:14), yakni dimensi yang berinterelasi “*the personal, social, spatial dan temporal dimension*”; mengembangkan seperangkat kompetensi, yakni “*civic knowledge*” (pengetahuan kewarganegaraan), “*civic*

skills” (keterampilan kewarganegaraan), dan “*civic dispositions*” (karakter/watak kewarganegaraan) (Branson, 1998:5).

Substansi PKn baru di atas, secara praksis-metodologis menuntut model pembelajaran demokratis untuk menopang akselerasi pembangunan budaya demokrasi dalam pendidikan persekolahan. Hal ini penting, sebab Tacman (2006) dalam penelitiannya menyatakan, “...*the democratic attitudes of classroom teachers which is important for improving people’s democratic behavior*”, atau sikap-sikap demokratis guru dalam pembelajaran di kelas, adalah hal penting untuk meningkatkan perilaku demokratis siswa. Senada dengan itu, dikatakan Davis dan Blair (Karahana, 2009:1), ‘...*development of democratic life culture depends on the democratic education sistem*’, maksudnya bahwa pengembangan budaya kehidupan demokratis bergantung pada sistem pendidikan yang demokratis.

Berdasarkan kajian penelitian di atas, maka dibutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Idealnya, upaya membudayakan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, yakni pendidikan kewarganegaraan (PKn). Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “ruh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembudayaan nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi melalui ceramah, melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan budaya demokrasi yang sesungguhnya.

Tujuan yang hendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnya kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim *civil society* (masyarakat madani) di Indonesia.

Untuk tujuan itu, Gandal dan Finn (1992:5-6) menyarankan dikembangkannya pendidikan demokrasi dalam dua seting besar. *Pertama*, “*school-based democracy education model*”, yakni model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam konteks pendidikan formal. Model ini menurut Polma (Suhartono, dkk.,2008) dikembangkan untuk mendekatkan materi pembelajaran dengan objek sesungguhnya atas pengkajian fenomena sosial secara langsung. Pengembangan model ini dilaksanakan melalui bentuk kegiatan pembelajaran intra dan ekstra kurikuler yang bernuansa demokratis. *Kedua*, “*society-based democracy education model*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat.

Praksis model *school-based democracy education* ini menurut Gandal dan Finn di atas, dapat dikembangkan dalam empat alternatif bentuk, yakni : *pertama*, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang “...*the root and branches of democratic ideas*”, yakni hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang

berkembang di Indonesia. *Kedua*, mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi “...how the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages”, yakni bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. *Ketiga*, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi dinegaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sisten demokrasi dalam berbagai konteks.

Kedua model pendidikan demokratis tersebut di atas, harus dirancang secara sistemik dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Dan diciptakan interaksi fungsional-pedagogis dalam iklim sosial budaya di sekolah dan di luar sekolah. Pembelajaran di kelas dikembangkan sebagai “*democratic laboratory*”, lingkungan sekolah sebagai “*micro cosmos of democracy*”, dan masyarakat luas sebagai “*open global democracy*” (Winataputra, 2001; 2005:17; 2007:226). Sehingga, siswa akan terlibat langsung sebagai subjek dan objek untuk tujuan berdemokrasi. Inilah makna yang oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:219; Winataputra, 2005:17) disebut sebagai “*learning democracy, thought/in democracy and for democracy*”.

Selama ini, beberapa hal yang dianggap merupakan kegagalan pendidikan demokrasi di sekolah adalah lemahnya upaya pengakaran nilai-nilai demokrasi. Kegagalan itu, menurut Azra (2001:3) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. *Pertama*, secara substantif, pelajaran PKn, tidak dipersiapkan sebagai materi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. *Kedua*, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentif, monologis, dan tidak partisipatoris. *Ketiga*, subjek material lebih bersifat teoretis dari pada praksis

Analisis lain dikemukakan Winataputra (2001:14); yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn kini baru “*teaching about democracy*”, belum “*how to build democracy*”; proses pembelajaran masih berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan (*knowledge oriented*) (Suryadi, 2003:4; Budimansyah, 2009:7); tidak demokratis berbasis gender, monolitik dan bersifat *top down* (Zuriah dan Sunaryo, 2008:93); didominasi oleh sistem konvensional dan tidak pada proses “*contextualized multiple intelligence*” (Komalasari, 2008:77); dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti “*ground covering technique, indoktrinative, and narrative technique*” dalam pembelajaran sehari-hari (Somantri, 2001:245); proses belajar mengajar dengan menekankan pada siswa untuk menghafal pelajaran dengan mengorbankan pengembangan “*critical thinking*” (Zamroni, 2002:16).

Kajian yang mengungkap beberapa kegagalan di atas, perlu rekonseptualisasi pendidikan demokrasi untuk menciptakan sistem dan budaya sekolah demokratis. Membangun budaya demokrasi di sekolah adalah menjadikan

sekolah menjadi media insemnasi dan pemekaran nilai-nilai demokrasi bagi kehidupan individu dan peran publiknya. Untuk itu, maka secara teoretis dan praktis, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk membangun sekolah demokratis, yakni *proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, dan budaya sekolah demokratis*. Dalam konteks sekolah demokratis, aspek yang ketiga, yakni kultur sekolah menjadi kekuatan penting. Kultur sekolah perlu menjiwai dan membingkai segenap aktivitas, inovasi pembelajaran, dan pengelolaan sekolah.

Kultur sekolah dapat dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Kultur sekolah ini dikonsepsi dan diwujudkan melalui pembelajaran dan rancangan aktivitas sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa didik, dan *stakeholders*. Keterlibatan bersama mereka sebagai dasar dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan (Zamroni, 2002:21).

Berkaitan dengan membangun budaya demokrasi di sekolah maka sikap mental dan perilaku individu sebagai warga sekolah harus mencerminkan konsep wawasan, nilai, norma dan prinsip demokrasi dalam diri individu warga sekolah itu sendiri. Ada sepuluh indikator budaya kewarganegaraan demokratis yang dapat dijelaskan berikut ini, menurut Winataputra dan Tim CCE (2007:11-13), yakni :

1. *Pro bono publico* yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. *Pro patricia primus patrialis* yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara.

3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda.
4. Terbuka menerima pendapat orang lain.
5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.
6. Bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain.
7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
8. Menghormati hak orang lain; Menghormati kekuasaan yang sah.
9. Bersikap adil dan tidak diskriminatif.
10. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, sinergi membangun atmosfir kultur sekolah demokratis harus berprinsipkan pada pilar-pilar demokrasi konstitusional yang berlandaskan filsafat Pancasila dan UUD 1945, yang menurut Sanusi (2006:193-205) ada sepuluh (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yakni : Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Kesepuluh sikap mental dan perilaku budaya demokrasi dengan berprinsipkan sepuluh pilar demokrasi konstitusional di atas, dijadikan suatu acuan kajian penelitian model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif “*school-based democracy education*” di SMA Terpadu (SMAT) Krida Nusantara (KN) Bandung. SMAT KN menjadi unit penelitian kasus ini dikarenakan sekolah ini mengembangkan tiga pilar pendidikan, yakni akademik, agama dan *life skill*, yang implementasinya

dalam kultur sekolah, menggunakan empat pendekatan disiplin, yaitu : Depdiknas, militer, keagamaan, dan wali asuh.

Selain itu, sekolah ini adalah sekolah *boarding* yang merepresentasikan siswa-siswa yang multikultur, multi etnis dan multi agama, yakni : (7,75%) siswa yang berasal dari Bandung, selebihnya (92,25%) datang dari berbagai daerah di Indonesia; beragama Islam (87,60%), Protestan (7,56%), Katolik (2,33%), Hindu (2,33%), Budha (0,19%) (Profil SMAT KN 2009/2010).

Untuk tujuan penelitiannya, maka orientasi penelitian kasus ini adalah : (1) persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa terhadap pengembangan pendidikan demokrasi di sekolah; (2) implementasi pembelajaran PKn demokratis; (3) sosio-kultur sekolah berasrama yang menggambarkan gagasan, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi konstitusional dalam perspektif pendidikan demokrasi berbasis sekolah (*school-based democracy education*), baik di sekolah maupun dalam sosio-kultur kehidupan asrama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus masalah penelitian ini yakni, "Bagaimanakah model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *school-based democracy education* di SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung?" Agar lebih terarah, maka fokus masalah di atas dirinci dalam beberapa sub-masalah yang sekaligus menjadi pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMAT KN Bandung tentang konsep pendidikan demokrasi serta masyarakat sekolah demokratis?

2. Bagaimana implementasi pembelajaran PKn yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan materi, metode, media dan evaluasi dalam mengembangkan budaya demokrasi konstitusional ditinjau dari : dasar filosofis, dasar yuridis, karakteristik model pembelajaran PKn berbasis demokrasi?
3. Bagaimana budaya sekolah berasrama (*boarding-school culture*) yang berimplikasi pada pengembangan budaya demokrasi konstitusional dalam perspektif pendidikan demokrasi berbasis sekolah (*school-based democracy education*)?"
4. Bagaimana kendala dan upaya pendidikan demokrasi untuk pengembangan budaya demokrasi konstitusional dalam konteks : (a) kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler?; (b) sosio-kultur program *boarding school*?

C. Definisi Konsep

Konsep-konsep pokok dalam penelitian ini adalah budaya demokrasi konstitusional, pendidikan kewarganegaraan, dan *school-based democracy education*.

1. Budaya Demokrasi Konstitusional

Budaya demokrasi konstitusional adalah seperangkat gagasan, nilai dan perilaku demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi tertulis negara Indonesia adalah UUD 1945. Budaya demokrasi yang diisyaratkan dalam UUD 1945 adalah demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Asshiddiqie (2005:244) menegaskan bahwa demokrasi konstitusional adalah gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dimaknai oleh Cogan (1999:4) adalah sebagai “...*the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives.*” Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sementara dalam kurikulum tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

3. Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah (*School-Based Democracy Education*)

Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah (*School-Based Democracy Education*), yakni model pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal (sekolah). Model ini disarankan oleh Gandal dan Finn (1992) untuk mengembangkan kelas sebagai “*democratic laboratorium*”, dan sosio kultur sekolah sebagai “*micro cosmos of democracy*”.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan

kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan demokrasi berbasis sekolah di SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif tentang :

1. persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung tentang konsepsi pendidikan demokrasi serta masyarakat sekolah demokratis.
2. implementasi pembelajaran PKn demokratis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan materi, metode, media dan evaluasi dalam mengembangkan budaya demokrasi ditinjau dari : dasar filosofis, dasar yuridis, karakteristik model pembelajaran PKn berbasis demokrasi.
3. Budaya sekolah yang berimplikasi pada pengembangan budaya demokrasi konstitusional dalam perspektif "*school-based democratic education*".
4. kendala dan upaya pendidikan demokrasi untuk pengembangan budaya demokrasi konstitusional, dalam konteks : (a) kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler; (b) sosio-kultur program *boarding school*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, penelitian ini akan menggali dan mengkaji model pengembangan gagasan, nilai-nilai dan perilaku budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *school-based democracy education* di SMAT KN Kota Bandung.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis

bagi beberapa pihak, yakni:

1. Para siswa : memahami konsep, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan pembelajaran dan pengalaman nyata tentang demokrasi, sehingga siswa mampu menjadi objek dan subjek dalam mengaktualisasikan budaya demokrasi yang beradab dan konstitusional.
2. Para akademisi : khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran PKN berbasis demokrasi dan HAM yang sesuai dengan tuntutan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diinginkan.
3. Bagi sekolah : diharapkan akan memberikan sumbangan konseptual dan kerangka praxis-kurikuler dan sosio kultural pembelajaran demokrasi dalam konteks *school-based democratic education* untuk membudayakan perilaku demokrasi berkeadaban dan konstitusional.
4. Bagi Dinas Pendidikan : sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pengembangan kurikulum pendidikan berbasis demokratisasi dan HAM untuk akselerasi pembangunan budaya demokrasi yang berkeadaban dan konstitusional di persekolahan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni kajian yang dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan dan memverifikasi serta menyimpulkan data, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif.

Berkait dengan penelitian kualitatif ini Creswell (1998:15) mengemukakan bahwa :

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Makna bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.

Pendekatan kualitatif ini disebut juga penelitian “naturalistik” (Nasution (1996:18). Sebab, situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya. Untuk memahami makna dari fenomena yang terjadi secara alamiah itu, maka peneliti berperan sebagai *key instrumen*, yang harus mengumpulkan data dengan mendatangi langsung sumber data.

2. Metode Penelitian

Tradisi penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Studi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Faisal, 2008:22); sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dengan menggunakan studi kasus ini peneliti berharap dapat mengidentifikasi budaya demokrasi konstitusional dalam sebuah komunitas kewarganegaraan (*community civic*) di lingkungan SMAT Krida Nusantara Kota Bandung. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana persepsi para *stakeholder* sekolah (Kepala Sekolah, Guru PKn, Pembantu Kepala Sekolah, dan siswa) tentang pembelajaran demokrasi di sekolah; (2) Bagaimanakah implementasi pembelajaran PKn; (3) Bagaimana iklim budaya sekolah yang diciptakan untuk pengembangan budaya demokrasi konstitusional; (4) Bagaimana sosio-kultural siswa dalam pola kehidupan berasrama (*boarding school*).

Beberapa argumentasi dipilihnya metode studi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan dalam menggunakan beragam teknik pengumpulan data sebagai sarana untuk menjangkau dimensi otentik dari permasalahan yang diteliti.
- b. Memungkinkan peneliti dapat menggali dan mengkaji proses model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *school-based democracy education* secara mendalam dan menyeluruh.

3. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah studi literatur , wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

a. Studi Literatur

Studi literatur ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mengacu pada kajian Straus dan Corbin (2009:39) bahwa ada *lietratur teknis* dan *literatur non-teknis*. Literatur teknis, seperti laporan tentang kajian penelitian dan karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teoretik atau filosofis. Sedangkan literatur nonteknis seperti biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog, dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara.

Teknik kajiannya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan budaya demokrasi konstitusional, pendidikan kewarganegaraan, dan model *school-based democracy education*. Hasil studi literatur ini dapat dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti; termasuk juga memberi latar belakang mengapa masalah tadi penting diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk tujuan menggali konsepsi, persepsi, ide/gagasan, perasaan, motivasi, tuntutan, harapan dan kepedulian para subjek penelitian tentang pengembangan budaya demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *school-based democracy education* di SMAT KN Kota Bandung.

Jenis wawancara yang digunakan adalah *pertama*, wawancara informal (*the informal conversation interview*), dilakukan secara spontan pada proses

observasi dan narasumber tidak diberitahu sedang diwawancarai. *Kedua*, wawancara umum dengan pendekatan terarah (*the general interview guide approach*), ialah jenis wawancara yang menggariskan sejumlah isu yang harus digali dari setiap responden sebelum wawancara dimulai. *Ketiga*, wawancara terbuka yang baku (*the standardized open-ended interview*), meliputi seperangkat pertanyaan yang secara seksama disusun dengan maksud untuk menjangkau informasi mengenai isu-isu yang sesuai dengan urutan dan kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

c. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta tentang pengembangan budaya demokrasi konstitusional. Orientasinya adalah implementasi PBM PKn; dan pola-pola pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui potret iklim budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas soio-kultural dalam kehidupan berasrama.

Observasi partisipan dan non-partisipan dilakukan peneliti secara berulang sesuai konteks permasalahan yang dikaji di atas. Observasi yang dilakukan secara berulang ini pun bertujuan agar responden terbiasa, sehingga dapat berperilaku sewajarnya dan mengungkap budaya yang sesungguhnya (tidak dibuat-buat). Untuk kepentingan dalam penelitian ini, maka observasi ini dilakukan perekaman dan pemotretan yang akan dijadikan bahan analisis lebih lanjut.

d. Studi Dokumentasi

Peneliti memanfaatkan sumber-sumber berupa catatan dan dokumen (*non human resources*) untuk pengembangan analisis kajian. Sebagaimana Lincoln dan Guba (1985:276-277) menjelaskan bahwa catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi dan substansi yang terkait dengan model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif *school-based democracy education*. Dokumen-dokumen itu adalah Kurikulum SMAT Krida Nusantara, Dokumen Pembelajaran PKn, Jurnal, Profil Sekolah, Tata Tertib Sekolah, Program Pola Asuh *Boarding School*, dan sebagainya yang mendukung informasi dan data kajian.

G. Unit Penelitian dan Sumber Data

1. Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah SMAT Krida Nusantara, yang terletak di Jalan Cipadung, Cibiru Kota Bandung. Beberapa argumentasi pemilihan SMAT Krida Nusantara sebagai unit penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan pembinaan siswa (sekolah) dan pola pengasuhan (asrama) dengan berlandaskan kedisiplinan tinggi;

- b. Merepresentasikan siswa yang beragam dalam hal agama, etnis, budaya dan latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Menerapkan pola sekolah berasrama (*boarding school*) sebagai *micro cosmos* komunitas kewarganegaraan (*community civic*);
- d. Sekolah Berstandar Internasional (*SBI by School*) yang memadukan tiga pilar utama, yakni akademis, agama, dan *life skill*.

2. Sumber Data / Subjek Penelitian

Sumber data untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yakni : *pertama*, sumber bahan cetak (kepuustakaan), meliputi buku teks, dokumen-dokumen kurikulum, makalah, klipping, jurnal, surat kabar, situs internet, dan lain-lain, yang menjelaskan model pengembangan budaya demokrasi konstitusional di SMAT Krida Nusantara Kota Bandung.

Kedua, sumber responden (*human resources*), dipilih secara *purposive sampling*, yang didasarkan pada : (a) memainkan peran penting di sekolah; (b) memiliki pengetahuan yang berharga sesuai dengan kajian penelitian; (c) memiliki keinginan bekerja sama dan berbagi informasi tentang kajian penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan *snowball technique*, yakni dengan menghubungi beberapa narasumber, yang kemudian ditanya tentang narasumber lain yang potensi, begitu seterusnya, sampai semua data yang dibutuhkan untuk mengetahui konsepsi dan implementasi model pengembangan budaya demokrasi konstitusional dalam perspektif *school-based democracy education* terkumpul.